

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Amriani, Nurnaningsih, Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Anggara, Sahya, Sistem Politik Indonesia, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Baehr, Peter, dkk, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor, 1997.

Chomzah, Ali Achmad, Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahan, Jakarta: Pretasi Pustaka, 2003.

Handoyo, B. Hestu Cipto Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Prespektif Perundang-Undangan, Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2015.

Kansil, CST, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1983.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. XII, 2016.

Prayudi, dkk, Dinamika Politik Pilkada Serentak, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.

Rahmadi, Takdir, Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soekarto, Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumitro, Roni Hanitijo, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia, 2010.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suteki, dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

Jurnal atau Makalah

Benny, Dian Leonaro. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019 terhadap Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu

Tingkat Kabupaten/Kota.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 11, Nomor 2*, (2022): 6

Iqbal, Muhamad. “Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia.” *Literasi Hukum 3.2* (2019): 1-9.

Nugraha, Alfajar dan Atika Mulyandari. “Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Prespektif Fikih Siyasah.” *Mazahib, Vol XV, No. 2* (2016): 215-216.

Nugraha, Harry S. “Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1)* (2018): 61-85

Rubaie, Ach. “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1*, (2014): 94.

Rokilah, “Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia”, *Jurnal AJUDIKASI, Vol 1, No 2*, (2017): 57.

Subiyanto, Achmad Edi “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2*, (2020): 2

Triwahyuningsih, Susani. “Sistem Demokraso dalam Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 2*, (2019): 64.

Zoelva, Hamdan. “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3*,

(2013): 379.

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI

Website dan Sumber lainnya

Ashiediqie, Jimly. 2011, Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal. 3, dalam <http://www.jimly.com/>, (yang diakses pada tanggal 22 September 2022).

Sulisworo, Dwi, dkk. “Bahan Ajar Demokrasi.” Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional Universitas Ahmad Dahlan, (2012): 4-5.